DAFTAR PUSTAKA

- Al Makka, Harry., David P.E.Saerang, Inggriani Elim. 2015. Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Imiah Efisiensi*. Vol.15 No.04.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk. (2025, 28 Februari). *Kabupaten Nganjuk dalam Angka 2025* (No. Publikasi 35180.25001; No. Katalog 1102001.3518). BPS Kabupaten Nganjuk. Diakses Pada 16 Juni 2025. <https://nganjukkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/b34abb845a916b181495cecb/kabupaten-nganjuk-dalam-angka-2025.html>
- Bastian, Indra. (2016). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dien, E. S., Tinangon, J., & Stanley, S. D. (2015). Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 207–215.
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90.
- Faizah, A., & Ghofirin, M. (2020). Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2014-2018. *NCU Conference Proceedings*.
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). (2006). *Governmental Accounting, Auditing, and Financial Reporting (GAAFR)*.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat*. Edisi 1. Jakarta.
- Halim, A. 2007 *Rasio Efektifitas*
- Halim, A. 2011 *Perhitungan Selisih*
- _____. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Penerbit Salemba 4.

- Hansen & women 2005. *Managemen accounting*. Edisi ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Akuntansi Manajerial*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Hapsari, M. T., Gracia, N. V., Hikmah, S. U., Nastiti, S. M. S., Firnanda, E. E., & Sari, G. S. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Nganjuk: Studi kasus terhadap rasio pendapatan dan pembelanjaan daerah. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 237–248.
- Hapsari, M. T., Ayunda, S. S. D., Syahira, D., Azhari, K. D., Rahmadita, A., & Supit, A. S. N. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023. *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 10(3), 348–357.
- Idris, M. (2024, September 29). 7 tahapan proses penyusunan APBD kabupaten atau kota. Kompas.com. Diakses Pada 1 Mei 2025. <https://money.kompas.com/read/2024/09/29/221521926/7-tahapan-proses-penyusunan-apbd-kabupaten-atau-kota?page=all>
- Ikatan Akuntansi Indonesia 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Iqbal, M., Rachman, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Ekonomi UNIBA*.
- Khoirunnisa, U., Anwar, A., & Sangkala, M. (2024). Analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara. *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies*, 4(1), 115–122.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2007. *Rasio Efisien*
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi pertama. BPFE Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Kriteria Tingkat Efektivitas dan Efisiensi*

- Majampoh, M. R., & Datu, M. A. (2021). Laporan Realisasi Anggaran dan Manfaatnya dalam Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 45–55.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Margono. 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah.*
- Permendagri No. 77 Tahun 2020. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Rahmawati. 2021. *Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau*. *Accounting Jurnal*, 2(2).182 – 191.
- Rakasiwi, F. (2024). Analisis kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap efisiensi pendapatan asli daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 3(1), 98–107.
- Renyowijoyo Muindro. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Ruang Menyala. (2024). Pengertian APBD, fungsi, tujuan, dasar hukumnya dan sumbernya. Diakses pada 1 Mei 2025. [Pengertian APBD, Fungsi, Tujuan, Dasar Hukumnya dan Sumbernya](#)
- Santoso, S. (2013). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).

Saputra, A. K., Rahmadani, D., Syahputra, D. W., & Sukmawati, I. (2024). Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bogor tahun 2020-2022. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1(4), 296–302.

Sari, M. (2016). *Kinerja sektor publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. Pustaka Yustisia. Yogyakarta

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umam, M. K., Rochinda, E., & Suharto, R. B. (2024). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Balikpapan. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SME's)*, 17(2), 701–718.

Undang–Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Widjajanta, B., Widyaningsih, A., & Tanuatmodjo, H. (2014). *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, 20–22. CV Citra Praya

Zulhendra, & Fadilla. (2024). Analisis kinerja keuangan pendapatan belanja daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2020. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 163-171.